Pelestarian Sumber Daya Arkeologi Dalam Konteks Keruangan di Kawasan Borobudur (Studi Kasus Candi Borobudur, Mendut dan Pawon)

Oleh :
Yudi Suhartono, SS, MA
Balai Konservasi Peninggalan Borobudur

I. PENDAHULUAN

Candi Borobudur merupakan sumber daya arkeologi yang memiliki arti penting tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi dunia Internasional. Sumber daya arkeologi atau benda cagar budaya beserta situs-situsnya adalah sisa-sisa hasil budaya fisik peninggalan nenek moyang yang masih dapat dilihat di muka bumi sampai saat ini. Sumber daya arkeologi merupakan warisan budaya dan merupakan data yang sangat penting untuk rekonstruksi sejarah serta mengetahui proses perubahan masa lalu. *Scovil, Gordon dan Anderson* (1977 dalam Tjahjono, 1996) mengatakan bahwa sumber daya arkeologi adalah semua bukti fisik atau sisa budaya yang ditinggalkan oleh manusia masa lampau pada bentang alam tertentu yang berguna untuk menggambarkan, menjelaskan, serta memahami tingkah laku dan interaksi mereka sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perubahan sistem budaya dan alamnya. Sumber daya arkeologi itu merupakan bukti otentik yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dengan demikian diperlukan pelestarian dan pemanfaatan secara bijaksana dan seimbang.

Pelestarian merupakan kegiatan penting dan utama, sebab tanpa pelestarian maka kegiatan pembinaan dan pemanfaatan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan data pelestarian sumber daya arkeologi perlu mendapat perhatian utama untuk dikembangkan dan

dimasyarakatkan (Kusumohartono, 1993 : 46). Dalam kaitannya dengan pelestarian Candi Borobudur, pelestarian tidak hanya dilakukan pada Candi Borobudur sebagai sumber daya arkeologi tetapi juga pada kawasan Borobudur yang merupakan lingkungan Candi Borobudur pada masa lalu, mengingat bahwa keberadaan bangunan candi itu tidak terlepas dari lahan, dalam hal ini adalah kawasan, tempat bangunan itu didirikan, lebih dari itu adalah ruang dan lingkungannya.

Di kawasan Borobudur, selain Candi Borobudur terdapat juga sumber daya arkeologi lain yang tersebar di kawasan itu, seperti Candi Mendut dan Candi Pawon. Selain sumber daya arkeologi, di kawasan Borobudur sebagai sebuah ruang juga terdapat sumber daya lain yang tersebar di kawasan itu. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Anonim, 2007). Sumber daya lain yang terdapat di kawasan Borobudur antara lain berupa infrastruktur/sarana prasarana. Menurut Jayadinata 1999 dalam Wiryawan, 2001 : 25), Infrastruktur atau prasarana fisik adalah alat atau tempat yang paling utama dalam kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi. Dengan infrastruktur

ini maka kegiatan sosial dapat dilaksanakan dengan baik.

Adanya infrastruktur (sarana dan prasarana) di kawasan Borobudur merupakan bagian dari perkembangan pembangunan fisik kawasan Borobudur sebagai kawasan pariwisata tingkat dunia. Perkembangan di kawasan Borobudur menimbulkan perubahan pemanfaatan lahan dalam kawasan itu. Perubahan pemanfaatan lahan pada dasarnya merupakan gejala yang normal sesuai dengan proses perkembangan dan pengembangan sebuah kota, yaitu pertumbuhan dan transformasi (*Doxiades* dalam Zulkaidi, 1999). Fenomena itu membawa konsekuensi logis terhadap perubahan penggunaan lahan bukan perkotaan (*non urban*). Perubahan penggunaan lahan ini sering terjadi pada wilayah pinggiran kota (*urban fringe*), gejala demikian disebut invasi (Chapn dalam Ichsan, 1998).

Di lain pihak kawasan Borobudur telah masuk dalam dalam daftar *World Heritage List (WHL)* sebagai Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage*) dengan nomor 348 tertanggal 13 Desember 1991 dan kemudian diperbarui menjadi Nomor 592 Tahun 1991. Selain itu, dalam *ICOMOS (Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage)* tahun 1990 pasal 2 dijelaskan bahwa pusaka arkeologi seperti Borobudur dan situs di sekitarnya merupakan sumber daya budaya tidak terbarukan. Hal ini menyebabkan kawasan Borobudur

menjadi perhatian dunia dan keberadaannya dipantau terus-menerus oleh UNESCO, sehingga perlu dijaga kelestariannya. Dalam kenyataannya pula upaya pelestarian sumber daya arkeologi sering berbenturan dengan pembangunan baru di bidang prasarana fisik itu. Pembangunan bidang prasarana fisik sering berdampak negatif bagi upaya pelestarian sumber daya arkeologi. Rencana pengembangan kota atau wilayah masih sering mengabaikan keberadaan sumber daya arkeologi, pendirian pabrik-pabrik, pembangunan waduk, pembangunan jalan tol seringkali terpaksa mengancam atau menenggelamkan sumber daya arkeologi yang ada (Tjahjono, 1996). Dengan demikian pembangunan sering dianggap berdampak negatif bagi pelestarian sumber daya arkeologi. Untuk itu perlu jalan pemecahan yang dapat mempertemukan kedua belah pihak untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pembangunan pada pelestarian sumber daya arkeologi.

Dalam kaitan dengan hal itu, perlu dilakukan pemantauan terhadap perkembangan pemanfaatan lahan yang begitu pesat, seiring dengan pesatnya pembangunan di kawasan Borobudur, sehingga tidak akan mengganggu keberadaan sumber daya arkeologi di kawasan itu. Berdasarkan hal tersebut, muncul 3 permasalahan yang perlu dicarikan pemecahannya yaitu:

1. Seperti apakah bentuk konfigurasi sebaran berbagai sumber daya arkeologi yang terdapat di kawasan Borobudur dan sejauh manakah batas sumber daya arkeologi itu sebenarnya?
2. Dengan bentuk konfigurasi

sebaran sumber daya arkeologi itu, adakah hubungannya dengan pola (konfigurasi ruang kawasan) dan sistem (struktur, fungsi dan makna) keruangan tertentu?

3. Bagaimana cara melakukan pengendalian pembangunan, baik terhadap bangunan yang telah ada maupun bangunan baru yang mungkin tumbuh pada masa yang akan datang?

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Menemu-kenali hubungan antara keberadaan sumber daya arkeologi dengan sistem keruangan yang terjadi dalam perkembangan fisik dari masa ke masa;
2. Mempelajari dan menggali landasan konseptual yang berhubungan dengan keberadaan sumber daya arkeologi dan sumber daya lainnya;
3. Mengembangkan arahan pengembangan sistem keruangan kawasan Candi Borobudur secara terpadu dan berkesinambungan.

II. Nilai Penting Candi Borobudur, Mendut dan Pawon

Penentuan nilai Penting pada sumber daya arkeologi perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa penting sumber daya arkeologi yang ada, yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan pengelolaan selanjutnya terhadap sumber daya yang dikenal dengan istilah Manajemen Sumber daya Budaya (*Cultural Resource Management/CRM*). Penentuan nilai penting merupakan langkah awal karena perumusan rancangan

manajemen sumber daya budaya bergantung dari bobot signifikansi yang diberikan kepada sumber daya arkeologi. Apabila sumber daya arkeologi tidak memiliki nilai tertentu bagi masyarakat atau sebagian masyarakat, maka pengelolaan terhadap sumber daya tersebut tidak perlu lagi dilakukan (Pearson, 1995). Selain itu hasil penilaian juga menentukan prioritas dan upaya pelestariannya.

Pada Penelitian ini telah dilakukan penilaian nilai penting terhadap Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon, yang meliputi nilai sejarah, ilmu pengetahuan, asosiasi, estetika, arkeologi, ekonomi dan nilai legitimasi/hukum. Penentuan nilai penting disertai dengan pembobotan dilakukan dengan cara kuesioner yang mencerminkan pendapat masyarakat. Pembobotan versi peneliti dilakukan sebagai bagian dari analisis untuk mengetahui seberapa penting sumber daya arkeologi yang ada. Untuk lebih obyektif dalam melakukan pembobotan, dilakukan tidak hanya berdasarkan pendapat peneliti, tetapi juga didasarkan pada pendapat masyarakat. Pengambilan sampel masyarakat dilakukan secara acak dengan cara menyebarkan kuisisioner yang berisi intisari nilai penting yang terkandung dari masing-masing sumber daya arkeologi. Hasil pembobotan menunjukkan bahwa Candi Borobudur memiliki nilai yang sangat penting, sedangkan Candi Mendut dan Candi Pawon memiliki nilai yang penting (Suhartono, 2008).

III. Candi Borobudur, Mendut dan Pawon dalam konteks keruangan

Dalam upaya memecahkan

permasalahan, perlu dilakukan terlebih dahulu pembuatan peta struktur dan peta fungsi ruang pada lingkungan Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon, yang kemudian akan dikorelasikan dengan makna keruangan yang ada. Peta struktur ruang dalam bentuk peta zonasi pada ketiga candi tersebut. Dalam pembuatan zoning didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Masing-masing zoning dibuat menjadi 3 zona. Penentuan luas zona 1 didasarkan pada batas asli sumber daya arkeologi, namun jika batas asli tidak ditemukan, penentuan didasarkan pada asumsi bahwa luas zona 1 yang ditentukan mencukupi untuk perlindungan areal tersebut. Sedangkan penentuan zona 2 dan zona 3, luas areal ditentukan dari kebutuhan masing-masing sumber daya arkeologi. Hasil pembagian zonasi sumber daya arkeologi dapat memperlihatkan bagaimana konfigurasi sebaran sumber daya arkeologi di sekitar Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon.

Peta fungsi keruangan persebaran sumber daya lainnya didasarkan pada interpretasi peta citra *ikonos* tahun 2003 dan pengumpulan data di lapangan pada sumber daya yang belum terdapat pada peta citra *ikonos* tersebut. Untuk menentukan fungsi keruangan akan digunakan beberapa indikator yaitu fungsi primer yang ini hanya digunakan pada sumber daya arkeologi, fungsi sekunder digunakan apabila ruang / bangunan berhubungan langsung dengan sumber daya arkeologi secara positif, fungsi tersier digunakan apabila ruang /

bangunan berhubungan langsung dengan sumber daya arkeologi secara negatif, fungsi kwarter digunakan apabila ruang / bangunan tidak ada hubungan dengan sumber daya arkeologi, dan fungsi mengganggu digunakan apabila ruang / bangunan mengganggu kelangsungan sumber daya arkeologi.

Peta struktur keruangan dan peta fungsi keruangan kemudian digabungkan untuk melihat kondisi keruangan yang ada di sekitar Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon. Dari hasil penggabungan tersebut yang berbentuk peta kondisi keruangan, terlihat bagaimana hubungan antara sumber daya arkeologi dengan pola dan sistem keruangan pada masing-masing penzoningan sumber daya arkeologi. Hampir di seluruh penzoningan sumber daya arkeologi terdapat sumber daya lain yang memiliki fungsi dan makna tidak sesuai dengan konsep penzoningan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

IV. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengertian tentang pengendalian pemanfaatan ruang lebih rinci disebutkan dalam pasal 35 dan pasal 36. Pada pasal 35 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Sedangkan pasal 36 menyebutkan bahwa:

- 1). Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
- 2). Peraturan zonasi disusun berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang;
3. Peraturan zonasi ditetapkan dengan:
 - a. Peraturan Pemerintah untuk arahan peraturan zonasi sistem nasional;
 - b. Peraturan daerah provinsi untuk arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan
 - c. Peraturan daerah kabupaten/kota untuk peraturan zonasi.

Dalam penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 36 dijelaskan bahwa peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian dan disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Di kawasan Borobudur, peraturan tentang zonasi telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan Taman Wisata Candi Borobudur dan Taman Wisata

Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya. Dalam Keputusan Presiden (Keppres) tersebut berisi tentang pembagian zonasi kawasan Borobudur menjadi 3 zona meliputi:

1. Zona 1. Zona ini merupakan lingkungan kepurbakalaan yang diperuntukan bagi perlindungan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan fisik candi. Luas zone 1 adalah $\pm 44,8$ Ha dan berbentuk lingkaran dengan titik pusat pada as candi. Zona ini menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Pariwisata;
2. Zona II. Zona ini merupakan kawasan di sekeliling candi dan diperuntukan bagi pembangunan taman wisata sebagai tempat kegiatan kepariwisataan, penelitian, kebudayaan dan pelestarian lingkungan candi. Luas zone 2 adalah $\pm 42,3$ Ha. Zona ini dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan;
3. Zona III. Zona 3 merupakan kawasan di luar zona 2 candi Borobudur dan diperuntukan bagi pemukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau atau fasilitas tertentu lainnya yang disediakan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan kawasan di zona I pada umumnya dan untuk mendukung kelestarian candi serta fungsi taman wisata pada khususnya. Luas zona III adalah ± 932 Ha. Zona ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Magelang.

Keputusan Presiden Nomor 1 tahun 1992 lebih mengutamakan pada pembagian

kewenangan pengelolaan kawasan Borobudur sebagai daerah tujuan pariwisata, sehingga aspek-aspek pelestarian benda cagar budaya yang seharusnya menjadi *basic* (dasar) kurang terakomodasi dalam peraturan tersebut. Adanya Keputusan Presiden nomor 1 tahun 1992 ini menimbulkan polemik karena tidak sesuai dengan masterplan Borobudur yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia dan JICA pada tahun 1979, terutama pada pembagian zonasi di kawasan Borobudur. Dalam *Masterplan* tersebut kawasan Borobudur terbagi menjadi 5 zonasi (JICA, 1979), yang meliputi:

1. Zona 1. Zona ini merupakan zona Inti (*Sanctuary area*), dengan luas areal sekitar 0.078 Km². Zona tersebut secara khusus diperuntukan untuk perlindungan monumen dan lingkungannya. Di dalam zona ini tidak diperkenankan mendirikan bangunan dan fasilitas baru yang bertentangan dengan prinsip pelestarian. Fasilitas yang ada hanya berupa pos keamanan, penerangan listrik, pagar, sistem drainase yang semuanya untuk tujuan perlindungan dan pelestarian bangunan Candi Borobudur;
2. Zona II. Zona ini merupakan zona taman wisata arkeologi, untuk menyediakan fasilitas taman dan perlindungan lingkungan sejarah dengan luas areal 0.87 Km². Pada zona ini dapat dibangun fasilitas baru namun harus dibatasi jumlahnya, diawasi bentuk arsitekturnya dan keserasian lingkungannya. Semuanya tidak bertentangan dengan upaya pelestarian dan menimbulkan pencemaran aspek arkeologi. Fasilitas yang ada misalnya museum, tempat parkir, toilet, tempat ibadah, warung

cinderamata dan loket karcis;

3. Zona III. Zona ini merupakan zona pengembangan (*Development zone*) dengan luas sekitar 10 Km². Zona tersebut merupakan kawasan pemukiman terbatas, daerah pertanian, jalur hijau dan fasilitas khusus yang dibuat dalam rangka menunjang kelestarian candi;
4. Zona IV. Zona ini merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah (*Historical scenery preservation zone*) dengan luas areal sekitar 26 Km²;
5. Zona V. Zona ini merupakan zona perlindungan kawasan bersejarah dengan luas areal sekitar 78,5 Km², yang diperlukan dalam rangka penanggulangan kerusakan terhadap peninggalan-peninggalan purbakala yang masih terpendam dalam tanah.

Pembagian zonasi yang dibuat oleh JICA sampai sekarang masih diterapkan di kawasan Borobudur sebagai suatu usaha untuk perlindungan sumber daya arkeologi di kawasan itu. Namun saat ini tampak pemanfaatan lahan yang begitu intensif untuk mendukung kegiatan pariwisata berupa pembuatan sarana dan prasarana. Yang kemudian menjadi masalah adalah pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan zonasi yang dibuat JICA. Kondisi tersebut berpengaruh pada keberadaan sumber daya arkeologi Candi Borobudur yang masih terikat erat dengan ketentuan perundang-undang baik nasional maupun internasional, termasuk harus mempertahankan keberadaan sumber daya arkeologi dan situs yang lain di dalam lingkup kawasan itu.

Pada perkembangan lebih

lanjut, Keppres nomor 1 tahun 1992 dan *Masterplan JICA*, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Pada pasal 23 ayat (2) dinyatakan bahwa “ untuk kepentingan perlindungan benda cagar dan situs diatur batas-batas situs dan lingkungan sesuai dengan kebutuhan” dan ayat (3) berbunyi “Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan”. Dalam penjelasan ayat (2) disebutkan bahwa Batas-batas situs ditetapkan berdasarkan atas batas asli bila masih ada; atau bila tidak ada lagi ditinjau dari keadaan *geotopografis* setempat seperti lereng, sungai, lembah dan sebagainya, atau kelayakan pandang untuk mengapresiasi bentuk atau nilai benda cagar budaya.

Batas lingkungan situs ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pengamanan ataupun pengembangan pemanfaatan benda cagar budaya sebagai obyek warisan budaya; dan ayat (3) berbunyi : yang dimaksud dengan sistem pemintakatan (*zoning*) adalah penentuan wilayah mintakat situs dengan batas mintakat yang penetuannya disesuaikan dengan kebutuhan benda cagar budaya yang bersangkutan untuk tujuan perlindungan. (Anonim, 1992 : 77-78). Sistem pemintakatan (*zoning*) dapat terdiri dari:

1. Mintakat/zona inti atau mintakat cagar budaya adalah mintakat tempat benda cagar budaya berada dengan lahan di sekitarnya yang berfungsi untuk mendukung kelestarian benda cagar budaya tersebut;

2. Mintakat penyangga, (*buffer zone*), adalah mintakat yang berfungsi sebagai penyangga yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas yang berkaitan dengan benda cagar budaya;

3. Mintakat Pengembangan yakni lahan di sekitar mintakat penyangga atau mintakat inti yang dapat dikembangkan untuk difungsikan sebagai sarana sosial, ekonomi dan budaya yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian benda cagar budaya dan situsya (Anonim, 1992 : 78 ; Sutopo, 2007:30).

Dalam pelaksanaan di lapangan, fungsi dan arahan setiap mintakat/ zoning dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Mintakat I

Lahan bebas dari bangunan baru dan tanaman yang mengancam kelestarian benda cagar budaya. Terdapat Lahan terbuka agar terdapat kelayakan pandang terhadap bangunan purbakala yang ada di dalamnya, dan dibuatkan jalan setapak (*passage ways*) dengan konstruksi berskala kecil untuk para pengunjung.

b. Mintakat II

Lahan tata hijau (*green belt*) berisi tanaman penghias, tanaman penahan angin (*wind breaker*), dan tanaman peneduh. Tanaman keras yang ditanam merupakan tanaman *historik* atau tanaman yang sudah langka misalnya pohon sawo kecik, keben, ketapang dan sebagainya. Selain itu juga dapat didirikan bangunan peneduh dan pos keamanan dengan konstruksi skala kecil serta jalan setapak untuk pengunjung.

3. Mintakat III

Lahan fasilitas (*facility area*) untuk pembangunan prasarana dan sarana penunjang sesuai

dengan kebutuhan serta pemanfaatan situs, antara lain pusat informasi, museum lapangan (*site museum*), lapangan parkir, *camping ground*, kedai makan dan minum, kiosk-kiosk cinderamata, *play ground*, pos keamanan, kantor pos dan telepon, balairung atau pendopo, kantor pengelola, mushola, toilet serta prasarana dan sarana lainnya (Sutopo, 2007:31).

Berdasarkan hal-hal di atas, maka dalam analisis pengendalian pemanfaatan ruang, dicoba tidak menggunakan pembagian zonasi seperti yang tercantum dalam Keppres Nomor 1 tahun 1992 atau *Masterplan JICA* tahun 1979, tetapi menggunakan pembagian zonasi setiap sumber daya arkeologi yang telah diuraikan pada sub bagian sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pembagian zonasi yang telah diuraikan berpedoman pada Peraturan Pemerintahan (PP) Nomor 10 tahun 1993 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan berfokus pada usaha pelestarian sumber daya arkeologi yang ada di kawasan Borobudur khususnya di wilayah penelitian. Khusus untuk areal di antara 3 zonasi yang telah dibuat dan tidak termasuk dalam lingkup ke tiga zonasi, untuk perlindungan areal dimaksud, digunakan pembagian zonasi yang dibuat oleh *JICA* dan termasuk dalam zone 3 dan 4. Hal ini dikarenakan pembuatan zonasi Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon merupakan suatu model untuk melihat kondisi keruangan yang ada di kawasan Borobudur. Untuk pengendalian pemanfaatan ruang ini didasarkan peta kondisi keruangan yang telah

sebutkan pada sub bagian sebelumnya, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk Candi Borobudur, dikarenakan sebagai warisan budaya dunia dan mempunyai nilai penting yang sangat tinggi, pelestarian dilakukan menyeluruh pada lingkungan sekitarnya terutama di zona 1 dan zona 2, tempat bangunan / ruang yang mempunyai fungsi yang tidak sesuai dengan keberadaan Candi Borobudur (fungsi tersier dan fungsi kwarter) dipindahkan ke tempat lain sesuai dengan fungsinya. Zona 1 dan zona 2 Candi Borobudur harus bersih dari bangunan/ruang yang memiliki fungsi yang bertentangan dengan pelestarian Candi Borobudur. Khusus untuk sumber daya berupa lahan sawah dan kebun milik penduduk yang terletak di zona 2 dan zona 3 dapat dipertahankan keberadaannya, karena tidak mengganggu upaya pelestarian dan dapat menjadi salah satu atraksi bagi wisatawan serta pemberdayaan masyarakat sekitar untuk dapat menggarap sawah dan kebun di kedua zona tersebut;
- b. Untuk Candi Pawon, dikarenakan memiliki nilai penting yang tinggi, upaya pelestarian dapat dilakukan minimal pada zona 1. Hal ini dikarenakan areal zona 1 tidak begitu luas sehingga jika harus membebaskan lahan penduduk tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan sosial. Untuk zona 2 dan zona 3 dikarenakan lahan di sekitar sumber daya arkeologi telah dipenuhi oleh pemukiman penduduk sehingga untuk pelestarian yang ideal sesuai dengan konsep pemintakatan,

sangat sulit dilakukan karena akan menimbulkan permasalahan sosial yang sangat besar. Untuk itu diperlukan regulasi peraturan tata ruang sehingga tidak ada penambahan bangunan baru baik pada zona 2 dan zona 3;

- c. Untuk candi Mendut yang memiliki nilai penting yang tinggi beserta sumber daya arkeologi lain yang ada dalam zonasi Candi Mendut, pelestarian di areal zonasi, tidak dapat dilakukan secara ideal sesuai dengan konsep pemintakatan. Hal ini dikarenakan di sekitar Candi Mendut telah dipenuhi pemukiman penduduk yang sangat padat, bisa menimbulkan permasalahan sosial yang sangat besar jika harus 'menggusur' pemukiman penduduk dalam zonasi candi Mendut. Untuk itu, dalam pelestarian candi Mendut dan sumber daya arkeologi lainnya dilakukan minimal pada bangunan sumber daya arkeologi beserta halaman di sekelilingnya. Seperti di Candi Pawon, untuk zonasi Candi Mendut, diperlukan juga regulasi peraturan tata ruang sehingga tidak ada penambahan bangunan baru baik pada zona 2 dan zona 3.

V. Strategi Pelestarian Sumber Daya Arkeologi

Pada hakekatnya, sumber daya arkeologi adalah milik seluruh lapisan masyarakat sehingga pemanfaatannya harus sepengetahuan masyarakat. Konsep seperti ini menganggap bahwa sumber daya arkeologi merupakan bagian dari sumber daya budaya. Sumber daya ini mempunyai kedudukan seperti beberapa sumber daya lainnya seperti sumber

daya manusia dan sumber daya alam. Pengelola terhadap sumber daya harus memperhatikan sifat dan kondisi sumber daya tersebut. Sumber daya arkeologi, berupa *artefak*, *fitur* dan *ekofak* yang meliputi bangunan, lansekap dalam suatu lokasi tertentu mempunyai sifat *fragmentaris*, jumlah terbatas, mudah rusak, kontekstual dan tidak dapat diperbaharui. Selain itu, mempunyai nilai yang nampak secara fisik (*tangible*) maupun nilai yang terkandung di dalamnya atau non fisik (*intangible*) (Drajat, 1995 : 3). Oleh karena itu, sumber daya arkeologi harus dilestarikan karena memiliki nilai penting yang terkandung di dalamnya. Pelestarian adalah upaya mempertahankan sumber daya arkeologi agar tetap lestari dengan cara melindungi dan memelihara sumber daya arkeologi. Dalam konteks keruangan, pelestarian sumber daya arkeologi juga harus memperhatikan kondisi keruangan dan kondisi sosial masyarakat serta bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam upaya pelestarian sumber daya arkeologi di kawasan Borobudur, perlu dirumuskan langkah-langkah pelestariannya, dengan berpedoman pada konsep manajemen sumber daya arkeologi yang meliputi pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan penelitian. Langkah-langkah pelestarian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pendokumentasi sumber daya arkeologi

Pendokumentasian sumber daya arkeologi merupakan salah satu langkah untuk membuat dokumen secara lengkap untuk menunjang pelestarian sumber daya arkeologi (*preserved by record*). Pendokumentasian sangat perlu dilakukan secara berkala terhadap sumber daya arkeologi baik yang telah

dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan. Kegiatan ini akan melestarikan tinggalan-tinggalan sumber daya arkeologi melalui dokumen, meskipun sumber daya arkeologi itu telah rusak atau musnah;

2. Penelitian untuk mencari batas asli sumber daya arkeologi
Dalam penentuan luas zona terutama dalam menentukan luas zona 1 selalu mengalami kesulitan mencari batas asli sumber daya arkeologi sehingga dalam penentuan zona 1 tidak berdasarkan pada batas asli sumber daya arkeologi, tetapi berdasarkan ketentuan lain yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1992. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan penelitian yang lebih intensif untuk mengetahui batas asli sumber daya arkeologi yang ada di kawasan Borobudur;

3. Penerapan (regulasi) peraturan tata ruang
Melihat perkembangan pemanfaatan ruang di kawasan Borobudur yang begitu pesat, maka perlu dilakukan penerapan terhadap regulasi peraturan tata ruang secara ketat. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemanfaatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan konsep pelestarian kawasan sumber daya arkeologi dan menekan timbulnya permasalahan di kemudian hari;

4. Revisi Peraturan Pengelolaan
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992, Pengelolaan kawasan Borobudur dilakukan oleh instansi/lembaga yang berbeda

pada setiap zona. Zona 1 dikelola oleh lembaga purbakala dalam hal ini Balai Konservasi Peninggalan Borobudur. Zona 2 dikelola oleh PT. Taman Wisata Candi Borobudur, sedangkan zona 3 dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Khusus untuk Candi Mendut dan Candi Pawon, pengelolannya dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yang berkedudukan di Prambanan.

Pengelolaan yang ada saat ini sangat tidak efisien dan tumpah tindih dalam pelaksanaannya, sehingga mengganggu dalam upaya pelestarian sumber daya arkeologi yang ada di kawasan Borobudur. Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul seputar pengelolaan kawasan Borobudur, perlu dilakukan revisi atau perbaikan terhadap peraturan perundangan yang ada saat ini. Revisi ini sangat penting untuk mendapat kejelasan di bidang hukum untuk melakukan pengelolaan kawasan secara terpadu dan terintergrasi.

5. Pengembangan Kelembagaan
Dalam upaya untuk melestarikan sumber daya arkeologi yang ada di wilayah

penelitian dan untuk menyeimbangkan antara pelestarian, penelitian dan pemanfaatan, maka perlu dilakukan pengelolaan kawasan Borobudur khususnya candi Borobudur, candi Pawon dan candi Mendut secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan ini sangat diperlukan, mengingat banyaknya permasalahan yang muncul pada pengelolaan yang ada saat ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengembangan kelembagaan yang akan mengelola kawasan Borobudur. Kelembagaan ini harus didasarkan pada aspirasi *stakeholder* yang meliputi pemerintah, masyarakat dan akademis dan pada konsep keterkaitan antar stakeholder tersebut.

Keterkaitan antar *stakeholder* dapat digambarkan pada diagram 1.

Berdasarkan konsep keterkaitan antar stakeholder, kemudian direalisasikan dalam beberapa alternatif kelembagaan pengelola kawasan Borobudur sebagai berikut:

- a. Model Kelembagaan Terpusat

Model ini melibatkan pemerintah, akademis dan masyarakat sebagai perencana dan pengelola kawasan, dengan salah satu instansi atau organisasi ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. Diagram model ini dapat digambarkan pada diagram 2;

b. Model Kelembagaan Terpadu (Badan Pengelola)

Model ini melibatkan unsur pemerintah, masyarakat dan akademis sebagai pengelola kawasan, tempat organisasi yang dibentuk dengan memasukkan unsur dari ketiga stakeholder dan bertanggung jawab kepada dewan pelindung dalam hal ini Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri pekerjaan Umum dan Menteri Lingkungan Hidup. Model badan pengelola ini secara spesifik mensyaratkan adanya profesionalisme dari masing-masing individu yang terlibat di dalamnya. Model ini dapat dilihat pada diagram 3 (Suhartono, 2008).

6. Evaluasi Berkesinambungan
Evaluasi terhadap pelestarian dan, pemanfaatan sumber daya arkeologi, pemanfaatan ruang dan berbagai jenis kegiatan lainnya di kawasan Borobudur perlu dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini diperlukan untuk memperkecil permasalahan yang akan muncul di kemudian hari dan dapat segera memberi jawaban atas permasalahan tersebut.

VI. PENUTUP

Pelestarian sumber daya arkeologi di kawasan Borobudur harus mendapat perhatian yang serius, mengingat kawasan Borobudur telah diakui sebagai kawasan pariwisata tingkat dunia, yang diiringi dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke kawasan

Diagram 2. Model Pengelola Teras

Diagram 3. Model Kelembagaan Terpadu

tersebut. Perkembangan kepariwisataan ini juga mengakibatkan munculnya berbagai infrastruktur/sarana prasarana penunjang pariwisata di kawasan Borobudur, terutama di lingkungan sekitar Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon. Jika pertumbuhan infrastruktur/pemanfaatan ruang tidak dikendalikan, maka akan mengganggu keberadaan sumber daya arkeologi yang ada. Jika itu terjadi pada kawasan Borobudur, maka nilai penting yang ada pada kawasan tersebut akan hilang dan tidak mungkin akan tergantikan dengan nilai yang baru. Oleh karena itu diperlukan strategi pelestarian sumber daya arkeologi di kawasan Borobudur dengan melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah, masyarakat dan kalangan akademis.

DAFTAR PUSTAKA

Carr, Stephen, Franci, Mark, Rivlin.
Leanne G., Stone, Andrew M

1992, Public Space, Cambridge University Press, New York.

JICA. 1979 *Masterplan Borobudur Archaeology Park*. Jakarta : Pemerintah Republik Indonesia.

Pearson, Michael & Sharon Sullivan, 1995 *Looking After Heritage Places*. Melbourne : Melbourne University Press

Scovil, Gordon dan Anderson, 1977 "Guidelines for the Preparation of Statements of Environmental Impact on Archaeological Resources" dalam Schiffer, M.B dan G.J. Gumerman (ed) *Conservation Archaeology*. New York : Academic Press.

Soeroso, Amiluhur, 2007 *Penilaian kawasan pusaka Borobudur dalam kerangka perspektif Multiatribut ekonomi lingkungan dan implikasinya terhadap kebijakan Manajemen Ekowisata*, Disertasi ilmu lingkungan UGM

Subroto, 1995 *Peringkat-peringkat*

Benda Cagar Budaya Fakultas
Sastra Universitas Gajah Mada.

Sutopo, Marsis, 2007 *"Pengelolaan
dan Pengembangan Kawasan Cagar
Budaya"*, makalah pada
Bimbingan Teknis Pengelolaan
Warisan Budaya Dunia.
Borobudur: BKPB

Suhatono, Yudi 2008. Pelestarian
Sumber Daya Arkeologi
dalam Konteks Keruangan di
Kawasan Borobudur (Studi
Kasus Candi Borobudur,
Mendut dan Pawon), Tesis
Program Pascasarjana

Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta.

Tjahjono, Baskoro Daru, 1996
*"Pemikiran Inklusif Atas
Dampak Pembangunan Terhadap
Kelestarian Sumberdaya Arkeologi"*
Berkala Arkeologi No. 1 Tahun
XVI. Yogyakarta : Balai
Arkeologi

Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut